

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Pendapatan daerah meliputi seluruh dana yang diterima dari rekening kas umum daerah. Hal ini akan menjadi nilai tambah bagi dana lancar serta menjadi hal wajib untuk daerah dalam waktu satu tahun anggaran tanpa memerlukan pengembalian daerah. Adapun data perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2015 – 2023 dijelaskan sebagai berikut :

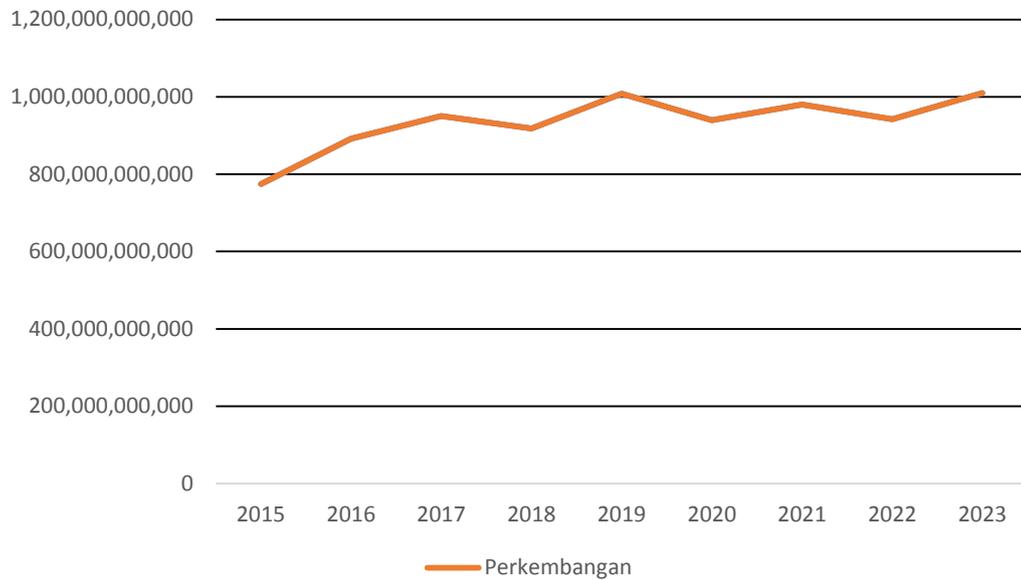
Tabel 5.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2015 - 2023

Tahun	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Perkembangan (%)
2015	774.264.084.398	-
2016	891.952.070.182	15.19
2017	950.700.535.730	6.58
2018	917.927.793.066	-3.44
2019	1.008.114.675.739	9.82
2020	939.495.651.453	-6.80
2021	980.263.296.076	4.33
2022	942.550.853.382	-3.84
2023	1.009.877.107.456	7.14
Rata - rata	935.016.229.720	3.22

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Dari tabel 5.1 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Di Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 2015–2023 dengan rata – rata perkembangan sebesar 3.22%. Diketahui realisasi anggaran pendapatan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 dengan perkembangan 215.19%, Tahun 2017 dengan perkembangan 6.58%, Tahun 2018 dengan perkembangan -3.44%, Tahun 2019 dengan perkembangan 9.82%, Tahun 2020 dengan perkembangan -6.80%, Tahun

2021 dengan perkembangan 4.33%, Tahun 2022 dengan perkembangan minus 3.84% dan Tahun 2023 dengan perkembangan 7.14%.



Gambar 3 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 - 2023

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Dari gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan cenderung mengalami penurunan, kecuali tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi *covid 19* yang melanda seluruh dunia. Tahun 2015-2023 pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2020 dan 2022. Pada tahun berikutnya pendapatan daerah di kabupaten humbang hasundutan disumbangkan sektor – sektor utama seperti sektor pertanian, sektor pariwisata dan sumber daya alam. Kinerja sektor pertanian cukup baik seiring kenaikan harga produksi. Wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan diperkirakan semakin baik terlepas dari dampak *covid 19*. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki sumber daya alam yang banyak sehingga diperkirakan seiring meningkatnya harga pasar dan harga komoditas seperti sumber daya alam perkebunan.

5.2 Perkembangan PAD Kabupaten Humbang Hasundutan

Undang – undang nomor 1 tahun 2022 menjelaskan bahwa penerimaan daerah yang terdiri dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan yang sah disebut pendapatan asli daerah atau disingkat PAD. Pendapatan asli daerah merupakan pendorong utama proyek pembangunan dan ukuran tingkat optimalisasi yang dicapai suatu daerah.

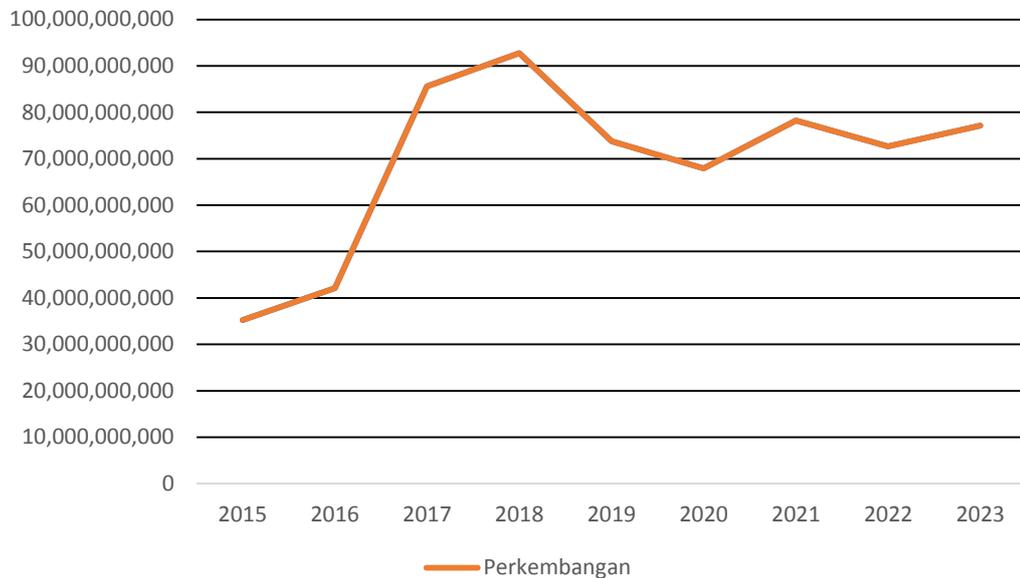
Tabel 5.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2015 - 2023

Tahun	PAD (Rp)	Perkembangan (%)
2015	35.237.805.568	-
2016	42.096.841.516	19.46
2017	85.598.357.027	103.33
2018	92.735.853.812	8.33
2019	73.757.931.630	-20.46
2020	67.937.694.746	-7.89
2021	78.250.589.733	15.17
2022	72.638.585.999	-7.17
2023	77.167.750.949	6.23
Rata - rata	69.491.267.887	13.00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2015–2023 dengan rata-rata perkembangan sebesar 13.00%. Diketahui PAD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 dengan perkembangan 19.46%, tahun 2017 dengan perkembangan 103.33%, tahun 2018 dengan perkembangan 8.33%, tahun 2019 dengan perkembangan -20.46%, tahun 2020 dengan perkembangan -7.89 %, tahun 2021 dengan perkembangan 15.17 %,

tahun 2022 dengan perkembangan minus 7.17 %, dan tahun 2023 dengan perkembangan 6.23 %.



Gambar 4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa pada tahun 2019 dan 2020 penurunan dan kenaikan pendapatan asli daerah dikarenakan beberapa hal seperti kenaikan disebabkan karena meluasnya pandemi covid-19 yang berdampak pada berkurangnya aktivitas perjalanan, industri dan kegiatan komersial lainnya. Perlambatan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha pertanian serta lapangan usaha informasi dan komunikasi. Pandemi covid – 19 yang menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara termasuk Indonesia, mendorong berbagai pemangku kepentingan menerapkan kebijakan lockdown dan pembatasan sosial. Kondisi ini menimbulkan shock permintaan khususnya terhadap komoditas energi primer dan komoditas perkebunan. Hal ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan. Namun disisi lain

pertumbuhan lapangan usaha pertanian terpantau meningkat didorong berlangsungnya panen raya tanaman dan hortikultura.

5.3 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Dalam rangka memenuhi tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belanja daerah adalah dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat. Biaya operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer merupakan komponen – komponen yang menyumbang total nilai belanja daerah. Diperlukan anggaran yang besar dan sesuai untuk belanja daerah guna memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Adapun selama periode tahun 2015 - 2023 perkembangan belanja daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

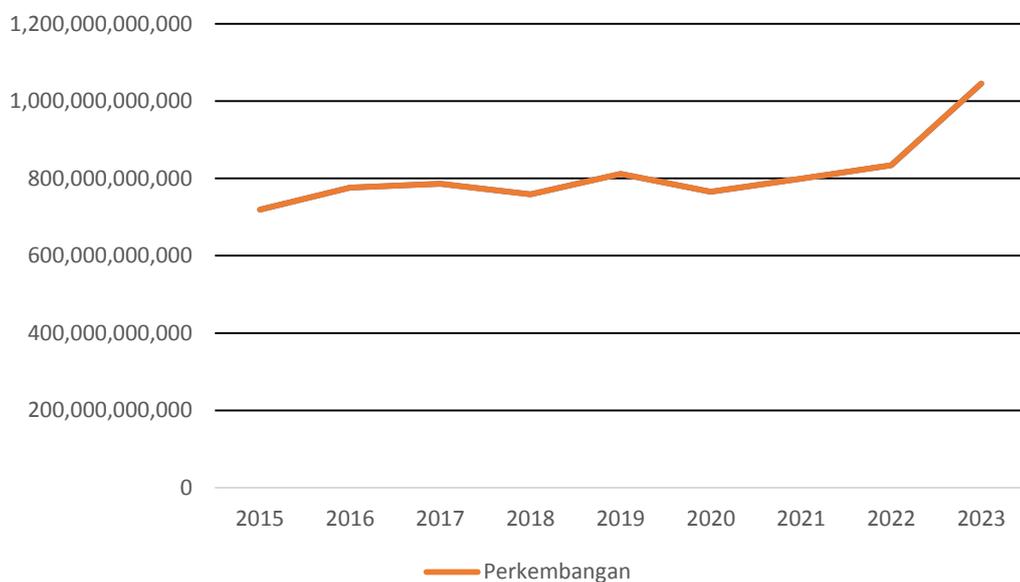
Tabel 5.3
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 - 2023

Tahun	Belanja Daerah (Rupiah)	Perkembangan (%)
2015	719.163.742.087	-
2016	776.264.580.350	7.93
2017	786.049.173.922	1.26
2018	758.721.345.616	-3.47
2019	811.690.125.779	6.98
2020	765.374.439.783	-5.70
2021	799.555.477.255	4.46
2022	834.298.860.910	4.34
2023	1.045.210.109.320	25.28
Rata - rata	810.703.095.002	4.56

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 2015-2023 dengan rata-rata perkembangan

sebesar 4.56%. Diketahui belanja daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 dengan perkembangan sebesar 7.93%, tahun 2017 dengan perkembangan sebesar 1.26 %, tahun 2018 dengan perkembangan sebesar -3.47 %, tahun 2019 dengan perkembangan sebesar 6.98 %, tahun 2020 dengan perkembangan sebesar -5.70 %, tahun 2021 dengan perkembangan sebesar 4.46 %, tahun 2022 dengan perkembangan sebesar 4.34 %, dan tahun 2023 dengan perkembangan sebesar 25.28 %.



Gambar 5 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Dari grafik diatas pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan dan pertumbuhan ekonomi konsumsi rumah tangga dilihat dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami kontraksi dan mencerminkan terjadinya peningkatan volume produksi di sektor perkebunan dan sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen konsumsi lembaga non profit.

5.4 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan cara membagi PAD terhadap TPD. Kontribusi dapat digunakan sebagai indikator dan perhitungan penting yang sangat berguna didalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah pada tiap tahun anggarannya.

Untuk mengetahui persentase PAD terhadap total pendapatan daerah, maka rasio derajat desentralisasi fiskal dapat menjadi tolak ukur kekuatan keuangan daerah otonom. Apabila suatu daerah dengan rasio desentralisasi fiskal yang tinggi berarti seluruh sumber daya yang dimilikinya baik dari sumber pendapatan baru yang dikelola maupun sumber pendapatan yang sudah ada dan dioptimalkan dapat digunakan untuk menghasilkan PAD yang bernilai tinggi.

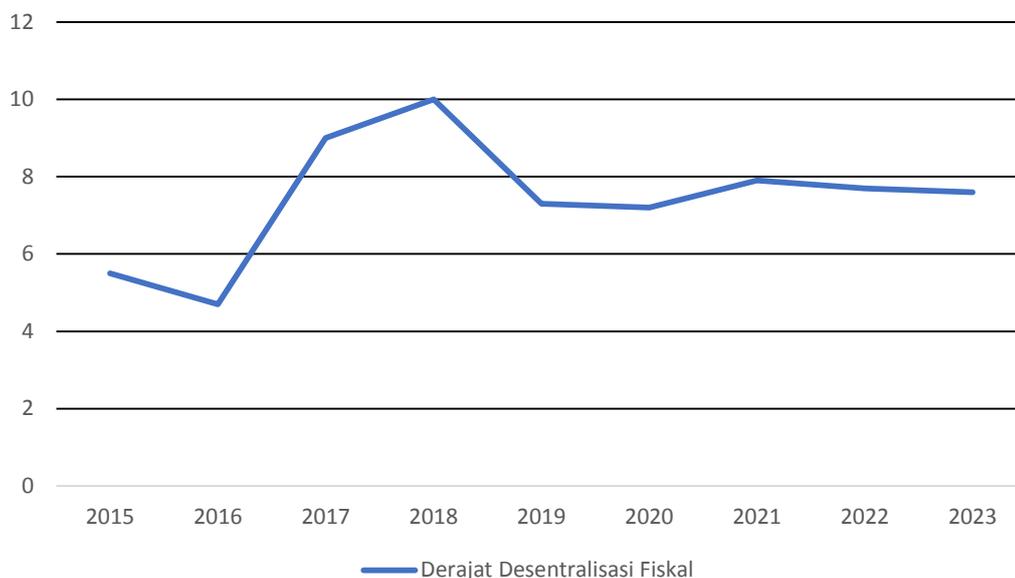
Demikian pula, pada daerah Kabupaten Humbang Hasundutan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya mereka sebaik – baiknya guna mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah pusat. Pada periode 2015 – 2023 Kabupaten Humbang Hasundutan berupaya melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa meski pertumbuhannya belum signifikan, pemerintah daerah telah berusaha meningkatkan pendapatan daerah secara positif. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan telah meningkatkan pendapatan daerah, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), dapat dilihat melalui tabel 5.4.

Tabel 5.4
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015- 2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Derajat Desentralisasi (%)
2015	35.237.805.568	774.264.084.398	5.55
2016	42.096.841.516	891.952.070.182	4.71
2017	85.598.357.027	950.700.535.730	9.00
2018	92.735.853.812	917.927.793.066	10.10
2019	73.757.931.630	1.008.114.675.739	7.31
2020	67.937.694.746	939.495.651.453	7.23
2021	78.250.589.733	980.263.296.076	7.98
2022	72.638.585.999	942.550.853.382	7.70
2023	77.167.750.949	1.009.877.107.456	7.64
Rata – rata	69.491.267.887	935.016.229.720	7.36

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat bahwa persentase tingkat derajat desentralisasi terkecil pada tahun 2016 yaitu 4.71% sedangkan persentase tingkat derajat desentralisasi terbesar terdapat pada tahun 2018 yaitu 10.10 %. Apabila dilihat dari tahun 2015 – 2023, rata – rata derajat desentralisasi yaitu 7.36 %, dimana berdasarkan tim Badan Litbang Depdagri RI fisipol-UGM yang menjelaskan mengenai kategori derajat desentralisasi fiskal yang mana nilai rasio tersebut masuk dalam kategori sangat rendah.



Gambar 6 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Berdasarkan gambar 6 dapat dilihat bagaimana perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2015 – 2024. Kabupaten Humbang Hasundutan dengan rata – rata rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2015 – 2023 adalah sebesar 7.36% dengan kategori sangat rendah, diharapkan mampu menggali sumber daya yang belum digunakan sepenuhnya serta meningkatkan keuntungan BUMD bagi daerah. Selain itu, adanya pembatasan sosial yang meluas akibat pandemi global covid -19 juga menjadi salah satu faktor penyebab turunnya PAD Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2015- 2023. Pembatasan tersebut telah menghambat aktivitas perdagangan dan pengolahan yang berdampak pada terhambatnya aktivitas perdagangan dan pengolahan serta menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya pendapatan perekonomian.

5.5 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

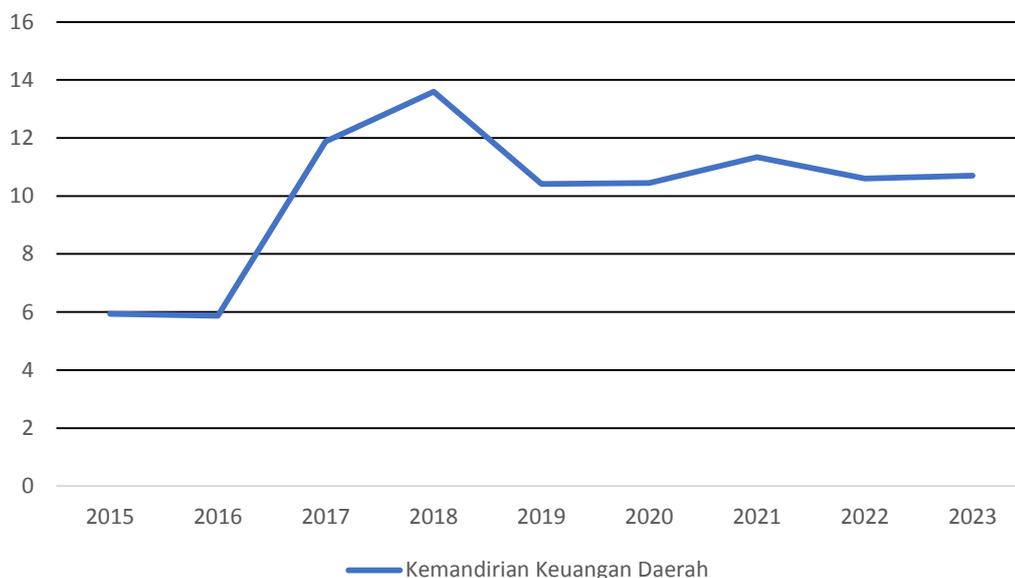
Rasio kemandirian keuangan daerah berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan serta kemandirian keuangan daerah secara keseluruhan. Kemandirian keuangan dapat diketahui dengan membandingkan PAD yang diterima daerah dibandingkan dana perimbangan yang diterima daerah. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan kabupaten humbang hasundutan periode 2015 – 2023 dapat dilihat dari tabel 5.5.

Tabel 5. 5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2015- 2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat + Pinjaman (Rp)	Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2015	35.237.805.568	593.461.102.765	5.93
2016	42.096.841.516	717.140.754.486	5.87
2017	85.598.357.027	719.933.211.876	11.88
2018	92.735.853.812	681.797.476.833	13.60
2019	73.757.931.630	707.685.265.766	10.42
2020	67.937.694.746	649.888.031.583	10.45
2021	78.250.589.733	689.659.205.455	11.34
2022	72.638.585.999	685.246.576.109	10.60
2023	77.167.750.949	720.525.071.519	10.70
Rata – rata	69.491.267.887	685.037.410.710	10.09

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel 5.5 dapat dilihat bahwa persentase tingkat kemandirian keuangan daerah terkecil pada tahun 2016 yaitu 5.87% sedangkan persentase tingkat kemandirian keuangan daerah terbesar terdapat pada tahun 2018 yaitu 13.60%. Apabila dilihat dari tahun 2015-2023 rata – rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu 10.09 % dimana hasil tersebut masuk kategori rendah sekali. Hal ini disebabkan karena bantuan yang diberikan pemerintah pusat melebihi dana asli daerah, sehingga tingkat kemandirian Kabupaten Humbang Hasundutan masih rendah.



Gambar 7 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Berdasarkan gambar 7 dapat dilihat bagaimana perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat meskipun upaya tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan. Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara dengan rata – rata rasio kemandirian keuangan daerah nya pada periode 2015 – 2023 adalah sebesar 10.09 % dengan kategori rendah sekali diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta menuruni angka ketergantungan daerah terhadap penerimaan pusat.

5.6 Analisis Efektivitas PAD

Untuk melihat gambaran seberapa besar kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2015 – 2023 dalam mengelola PAD yang telah direncanakan dan perbandingan target yang telah ditetapkan menurut potensi rill daerah dengan menggunakan pengukuran realisasi penerimaan dibagi

dengan target penerimaan pendapatan. Maka dari itu untuk mengetahui tingkat seberapa efektif PAD Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2015 – 2023 dipaparkan melalui tabel 5.6.

Tabel 5.6
Efektivitas PAD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015- 2023

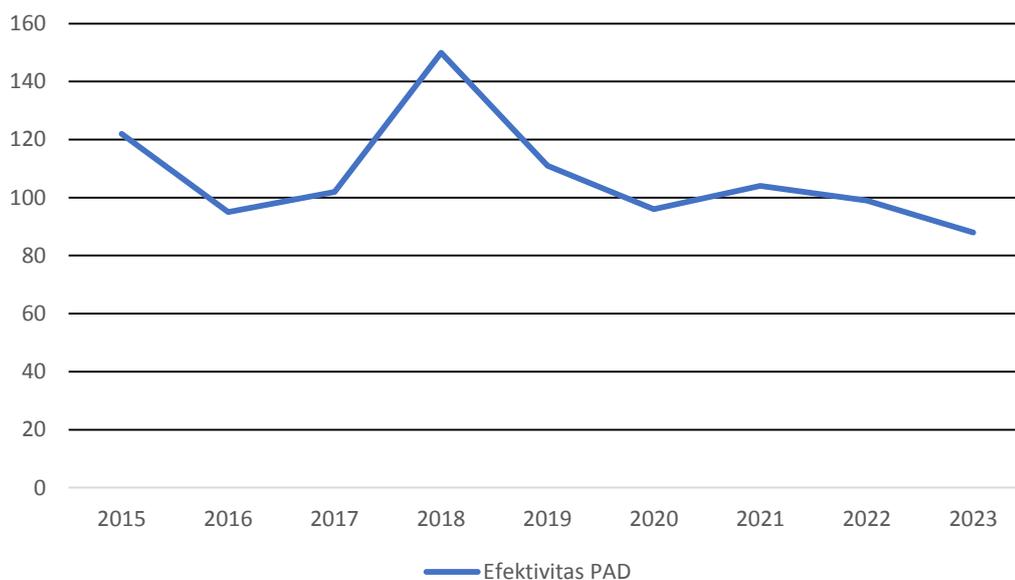
Tahun	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Efektivitas PAD (%)
2015	28.702.909.791	35.237.805.568	122.00
2016	44.000.703.967	42.096.841.516	95.00
2017	83.191.498.424	85.598.357.027	102.00
2018	61.716.876.667	92.735.853.812	150.00
2019	66.211.385.334	73.757.931.630	111.00
2020	70.130.037.834	67.937.694.746	96.00
2021	75.226.768.375	78.250.589.733	104.00
2022	72.960984.118	72.638.585.999	99.00
2023	87.048.350.602	77.167.750.949	88.00
Rata – rata	65.465.501.679	69.491.267.887	108.00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa persentase tingkat efektivitas PAD terkecil pada tahun 2023 yaitu 88.00% sedangkan persentase tingkat efektivitas PAD terbesar terdapat pada tahun 2018 yaitu 150.00%. Apabila dilihat dari tahun 2015 – 2023 rata – rata efektivitas PAD Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu 108.00 %, dimana hasil tersebut memasuki kategori sangat efektif. Hal ini tentu baik untuk perkembangan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan karena telah memanfaatkan dan mengalokasikan PAD nya dengan baik dan optimal.

Efektivitas PAD tertinggi yaitu adalah tahun 2018 memiliki perkembangan sebesar 150.00 %. Hal ini karena perbandingan realisasi penerimaan pemerintah

daerah dan target penerimaan pemerintah daerah dapat memadai sehingga hasil yang didapatkan baik. Efektivitas PAD terkecil yaitu adalah tahun 2023 memiliki perkembangan sebesar 88.00 % dikarenakan masih jauhnya perbandingan target pemerintah daerah terhadap realisasi yang diterima sehingga hasil yang didapatkan masih kurang baik.



Gambar 8 Perkembangan Efektivitas PAD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023 (data diolah)

Berdasarkan gambar 8 dapat dilihat bagaimana perkembangan efektivitas PAD pada Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2015 – 2023. Terdapat usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar PAD dapat dialokasikan dengan efektif sehingga menghasilkan kategori sangat efektif. Kabupaten Humbang Hasundutan dengan rata – rata efektivitas PAD nya pada periode 2015 – 2016 adalah sebesar 108% dengan kategori sangat efektif diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas PAD nya dengan sangat efektif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pasca otonomi daerah belum mampu mengelola

dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena kinerja keuangan masih kurang dan masih bergantung pada penerimaan pemerintah pusat. Hasil analisis dalam penelitian ini apabila dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD di Kabupaten Humbang Hasundutan dimana kinerja keuangan daerahnya masih sangat rendah.

5.7 Implikasi Penelitian

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian. Hasil penelitian ini mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Hasil penilaian berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu dengan menggunakan rumus dimana Pendapatan Asli Daerah dibagikan dengan Total Penerimaan Daerah dikalikan dengan 100. Dimana pada tahun 2015, 5.55%, tahun 2016, 4.71%, tahun 2017, 9%, tahun 2018, 10%, tahun 2019, 7.31%, tahun 2020, 7.23%, tahun 2021, 7.98%, tahun 2022, 7.70%, tahun 2023, 7.64%. Implikasi dari masalah ini adalah agar PAD bisa lebih meningkat, dengan melakukan pendataan ulang wajib pajak, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak dan menyediakan pelayanan yang baik seperti penggunaan aplikasi mobile, maka total penerimaan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan bisa lebih tinggi.
2. Hasil penilaian berdasarkan Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total pendapatan dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan didapat, dimana rasio kemandirian keuangan pada tahun 2015, 5.93%, tahun 2016, 5.87%, tahun 2017, 11.88%, tahun 2018, 13.60%, tahun 2019, 10.42%, tahun 2020, 10.45%, tahun 2021, 11.34%, tahun 2022, 10.60%, tahun 2023, 10.70%. Implikasi dari masalah ini adalah kurangnya kemampuan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mencapai kemandirian keuangan daerah, untuk memperbaiki rasio kemandirian keuangan maka dapat dilakukan melalui

optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah dan menciptakan pendapatan baru seperti pengelolaan aset daerah.

3. Hasil penilaian berdasarkan Efektivitas PAD yaitu dengan menggunakan rumus, dimana Realisasi Penerimaan PAD dibagi dengan target penerimaan PAD dikalikan dengan 100. Dimana tahun 2015, 122.00%, tahun 2016, 95.00%, tahun 2017, 102.00%, tahun 2018, 150.00%, tahun 2019, 111.00%, tahun 2020, 96.00%, tahun 2021, 104.00%, tahun 2022, 99.00%, tahun 2023, 88.00%. Pemerintah diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.